

FORMAT PENGISIAN LKPJ TA 2023

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKU) Pemerintah Daerah
Instansi Sekretariat DPRD T.A 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
	NIHIL				

Keterangan/Pembahasan tabel meliputi :

- a. Penjelasan indikator yang dimaksud/tujuan/rincian data indikator tsb
- b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kondisi awal tahun 2022
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan atau permasalahan dan solusi

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKD) Pemerintah Daerah
Instansi Sekretariat DPRD T.A 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
	NIHIL				

Keterangan/Pembahasan tabel meliputi :

- a. Penjelasan indikator yang dimaksud/tujuan/rincian data indikator tsb
- b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kondisi awal tahun 2022
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan atau permasalahan dan solusi

3. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Instansi Sekretariat DPRD T.A 2023

NO	PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	%	81	82	87,8

Indikator kinerja utama pada Sekretariat DPRD yaitu Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes pada tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 87,8% telah menunjukkan kesesuaian antara realisasi dan target kinerja yang telah ditentukan serta meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja sebesar 81%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan prosedur kerja dengan optimalisasi penggunaan aplikasi baik untuk rapat dan koordinasi di tingkat Sekretariat DPRD Kab. Brebes maupun Anggota DPRD;
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi KemenPANRB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Sekretariat DPRD Kab. Brebes;
3. Perbaiki pada aspek layanan, tata kelola dan penyediaan informasi publik

4. Capaian Kinerja Program Pembangunan

Capaian Indikasi Rencana Program Prioritas Instansi Sekretariat DPRD T.A 2023

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
1	Presentase Capaian Kinerja Penunjang Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks	80	82	95,50
2	Indeks Kepuasan atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Brebes	Indeks	80	82	94,81

Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD yaitu Presentase Capaian Kinerja Penunjang Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD pada tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 95,50% telah menunjukkan kesesuaian antara realisasi dan target kinerja yang telah ditentukan serta meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja sebesar 80%. Pada indikator Kepuasan atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Brebes menunjukkan realisasi 94,81% dari target 82% dengan kondisi awal di 2022 sebesar 80%. Hal tersebut dapat tercapai dikarenakan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan jadwal/schedule yang sudah ditetapkan.

5. Program mencakup tujuan, manfaat dan dampak dan Kegiatan dan sub kegiatan meliputi keluaran / hasil dari pelaksanaan kegiatan

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
----	---

a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output Kegiatan	: Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD
Outcome Kegiatan	: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Output Kegiatan	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Outcome Kegiatan	: Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Output Kegiatan	: Presentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Outcome Kegiatan	: Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output Kegiatan	:	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Outcome Kegiatan	:	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	:	a. Pengadaan Mebel b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Output Kegiatan	:	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Baru yang Masuk dalam BMD Sekretariat DPRD
Outcome Kegiatan	:	Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) Baru yang Masuk dalam BMD Sekretariat DPRD
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output Kegiatan	:	- Jumlah Unti Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Outcome Kegiatan	:	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Pemeliharaan Mebel d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Output Kegiatan	:	Presentase BMD Sekretariat DPRD Kondisi Rusak Menjadi Baik
Outcome Kegiatan	:	Terpenuhinya BMD Sekretariat DPRD Kondisi Rusak Menjadi Baik
h. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		

Sub Kegiatan	:	a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Output Kegiatan	:	Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Outcome Kegiatan	:	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
i. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		
Sub Kegiatan	:	a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD b. Fasilitasi Fraksi DPRD c. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Output Kegiatan	:	Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Administrasi
Outcome Kegiatan	:	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Administrasi

Tujuan Program	:	Sebagai Perwujudan Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Dampak Program	:	Signifikan dibuktikan dengan terlaksananya tugas dan fungsi DPRD dengan maksimal
Manfaat Program	:	Menunjang terlaksananya tugas dan fungsi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		
a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
Sub Kegiatan	:	a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah b. Pembahasan Rancangan Perda c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik e. Penyusunan Tata Tertib DPRD
Output Kegiatan	:	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
Outcome Kegiatan	:	Terpenuhinya Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Sub Kegiatan	:	a. Pembahasan KUA dan PPAS b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS c. Pembahasan APBD d. Pembahasan APBD Perubahan e. Pembahasan Laporan Semester

		f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Output Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran
Outcome Kegiatan	:	Tersedianya Dokumen Kebijakan Anggaran
c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	:	a. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Output Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengawasan Bidang Pemerintahan
Outcome Kegiatan	:	Tersedianya Dokumen Rekomendasi Pengawasan Bidang Pemerintahan
d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		
Sub Kegiatan	:	a. Pendalaman Tugas DPRD b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat e. Penyusunan Program Kerja DPRD
Output Kegiatan	:	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi DPRD
Outcome Kegiatan	:	Tercapainya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi DPRD
e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Sub Kegiatan	:	a. Kunjungan Kerja dalam Daerah b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD c. Pelaksanaan Reses
Output Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan Hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Analisis Data/Bahan Dokumen Jaring ASMARA)
Outcome Kegiatan	:	Tersedianya Dokumen Informasi Pembangunan Hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Analisis Data/Bahan Dokumen Jaring ASMARA)
f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
Sub Kegiatan	:	a. Penyusunan Kode Etik DPRD b. Pengawasan Kode Etik DPRD

Output Kegiatan	:	Dokumen Kode Etik DPRD
Outcome Kegiatan	:	Tersedianya Dokumen Kode Etik DPRD
g. Pembahasan Kerja Sama Daerah Kegiatan		
Sub Kegiatan	:	a. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
Output Kegiatan	:	Dokumen Kerjasama Antar Daerah
Outcome Kegiatan	:	Tersedianya Dokumen Kerjasama Antar Daerah
h. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		
Sub Kegiatan	:	a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD c. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Output Kegiatan	:	Presentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD
Outcome Kegiatan	:	Terpenuhinya Layanan Terhadap Tugas DPRD

Tujuan Program	:	Sebagai Perwujudan Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Dampak Program	:	Signifikan dibuktikan dengan terlaksananya tugas dan fungsi DPRD dengan maksimal
Manfaat Program	:	Menunjang terlaksananya tugas dan fungsi DPRD

6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Instansi Sekretariat DPRD T.A 2023

NO	INSTANSI	BELANJA		(%)
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Sekretariat DPRD	Rp 67.298.625.747,-	Rp 64.151.121.981,-	95,32%

Anggaran dan Realisasi Belanja Instansi Sekretariat DPRD T.A 2023

NO	URUSAN	BELANJA		(%)
		ANGGARAN	REALISASI	
	Belanja Operasi	Rp 67.117.084.747,-	Rp 63.974.286.381,-	95,31%
	Belanja Modal	Rp 181.541.000,-	Rp 176.835.600,-	97,41%
	JUMLAH	Rp 67.298.625.747,-	Rp 64.148.965.055,-	95,32%

Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Instansi Sekretariat DPRD T.A 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 49.949.118.100	Rp 47.700.710.282	95,50

1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.118.873.800	Rp 1.071.506.481	95,77
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 761.336.800	Rp 742.388.210	97,51
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 308.910.000	Rp 288.823.271	93,50
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 48.627.000	Rp 40.295.000	82,87
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.996.110.000	Rp 4.761.380.759	95,30
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.569.600.000	Rp 4.360.527.614	95,42
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 230.556.700	Rp 225.191.360	97,67
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 128.660.700	Rp 120.872.365	93,95
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 46.020.500	Rp 37.898.780	82,35
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	Rp 21.272.100	Rp 16.890.640	79,40
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 1.830.826.000	Rp 1.609.047.713	87,89
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	100,00
3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 1.458.826.000	Rp 1.295.412.920	88,80
3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 337.000.000	Rp 278.634.793	82,68
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2.176.161.200	Rp 1.970.587.139	90,55
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 26.188.000	Rp 25.510.400	97,41
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 65,097,000	Rp 56.788.000	87,24
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 232.974.200	Rp 225.319.500	96,71
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 600.000.000	Rp 431.867.000	71,98
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 201.902.000	Rp 185.561.420	91,91
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.050.000.000	Rp 1.045.540.819	99,58
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 127.941.000	Rp 123.430.000	96,47
5.1	Pengadaan Mebel	Rp 21.054.000	Rp 17.190.000	81,65
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 106.887.000	Rp 106.240.000	99,39
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 802.460.500	Rp 650.042.068	81,01
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 21,462,000	Rp 17.710.000	82,52
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 607,949,000	Rp 510.671.068	84,00
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Rp 173.049.500	Rp 121.661.000	70,30

	Perlengkapan Kantor			
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.532.547.000	Rp 968.701.692	63,21
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 624.377.000	Rp 234.235.992	37,52
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 211.320.000	Rp 102.047.000	48,29
7.3	Pemeliharaan Mebel	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00
7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 71.600.000	Rp 13.900.000	19,41
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 198.950.000	Rp 196.911.000	98,98
7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 406.300.000	Rp 401.607.700	98,85
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 37.320.407.000	Rp 36.509.980.230	97,83
8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp 35.914.953.000	Rp 35.391.476.535	98,54
8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp 1.278.054.000	Rp 1.012.174.235	79,20
8.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp 127.400.000	Rp 106.329.460	83,46
9.	Layanan Administrasi DPRD	Rp 43.791.600	Rp 36.034.200	82,29
9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000	33,33
9.2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp 26.760.000	Rp 22.880.400	85,50
9.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 14.031.600	Rp 12.153.800	86,62
II.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 17.349.507.647	Rp 16.450.411.699	94,82
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 1.366.794.000	Rp 1.212.558.975	88,72
1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 74.620.200	Rp 66.145.720	88,64
1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp 42.669.600	Rp 41.199.010	96,55
1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp 650.320.000	Rp 518.950.805	79,80
1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	100,00
1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp 99.184.200	Rp 86.263.440	86,97
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 12.718.200	Rp 11.251.160	88,47
2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 2.094.700	Rp 1.855.860	88,60

2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 2.124.700	Rp 1.883.860	88,66
2.3	Pembahasan APBD	Rp 2.124.700	Rp 1.871.860	88,10
2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Rp 2.124.700	Rp 1.871.860	88,10
2.5	Pembahasan Laporan Semester	Rp 2.124.700	Rp 1.883.860	88,66
2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 2.124.700	Rp 1.883.860	88,66
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 190.000.000	Rp 150.172.802	79,04
3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp 40.000.000	Rp 39.148.500	97,87
3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp 40.000.000	Rp 29.372.700	73,43
3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 40.000.000	Rp 36.960.700	92,40
3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp 40.000.000	Rp 33.009.700	82,52
3.5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp 30.000.000	Rp 11.681.202	38,94
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 2.993.032.700	Rp 2.717.902.282	90,81
4.1	Pendalaman Tugas DPRD	Rp 1.432.121.200	Rp 1.230.582.262	85,93
4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 611.400.000	Rp 609.855.600	99,75
4.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 252.000.000	Rp 216.000.000	85,71
4.4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp 693.781.000	Rp 658.357.920	94,89
4.5	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp 3.730.500	Rp 3.106.500	83,27
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 1.702.277.200	Rp 1.467.868.450	86,23
5.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp 142.619.400	Rp 63.571.672	44,57
5.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp 71.330.800	Rp 62.293.278	87,33
5.3	Pelaksanaan Reses	Rp 1.488.327.000	Rp 1.342.003.500	90,17
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 24.146.000	Rp 20.798.380	86,14
6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Rp 20.000.000	Rp 18.927.780	96,64
6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 4.146.000	Rp 1.870.600	45,12
7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp 78.050.000	Rp 67.380.000	86,33
7.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Rp 78.050.000	Rp 67.380.000	86,33
8.	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 10.982.489.547	Rp 10.802.479.650	98,36
8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp 10.779.642.147	Rp 10.614.991.294	98,47
8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp 110.800.000	Rp 107.738.000	97,24
8.3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp 92.047.400	Rp 79.750.356	86,64

7. Penghargaan yang didapat di tahun 2023 (tingkat provinsi dan atau tingkat nasional)

B. PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKA N	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
1.				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Tercapai	
1.2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	4 Laporan	4 Laporan	Tercapai	

				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				
1.3				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai	
2.				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bulan	36 orang/bulan	Tercapai	
2.2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	200 dokumen	200 dokumen	Tercapai	
2.3				Koordinasi dan	Jumlah dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	Tercapai	

				Pelaksanaan Akuntansi SKPD	koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD				
2.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai	
2.5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai	
3.				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
3.1				Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah paket pakaian dinas	7 Paket	7 Paket	Tercapai	

				Beserta Atribut Kelengkapannya	beserta atribut kelengkapan				
3.2				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen	1 Dokumen	Tercapai	
3.3				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	36 Orang / ASN	36 Orang	Tercapai	
4.				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
4.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	4 Paket	Tercapai	
4.2				Penyediaan	Jumlah paket	60 paket	60 paket	Tercapai	

				Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				
4.3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	4 Paket	Tercapai	
4.4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 paket	4 Paket	Tercapai	
4.5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	3 Paket	Tercapai	
4.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tercapai	
5.				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

5.1				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 kegiatan	1 kegiatan	Tercapai	
5.2				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 kegiatan	1 kegiatan	Tercapai	
6.				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
6.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	Tercapai	
6.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 laporan	5 laporan	Tercapai	
6.3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 laporan	11 Laporan	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan tingkat kerusakan kendaraan dinas masuk pada kategori kerusakan	

								ringan – sedang	
7.				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit	20 unit	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan tingkat kerusakan kendaraan dinas masuk pada kategori kerusakan ringan – sedang./ Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan sehingga estimasi anggaran yang tersedia tidak bisa terserap sepenuhnya.	
7.2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	4 unit	4 unit	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan tingkat kerusakan kendaraan	

				Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan pajak dan perizinannya			dinas masuk pada kategori kerusakan ringan – sedang. / Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan sehingga estimasi anggaran yang tersedia tidak bisa terserap sepenuhnya.	
7.3				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	15 unit	15 unit	Tercapai	
7.4				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	9 unit	9 unit	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan tingkat kerusakan peralatan dan mesin masuk pada kategori kerusakan ringan – sedang. / Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan sehingga estimasi anggaran yang tersedia	

								tidak bisa terserap sepenuhnya.	
7.5				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	Tercapai	
7.6				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	Tercapai	
8.				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
8.1				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	50 orang/bulan	50 Orang/bulan	Tercapai	

8.2				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	350 Stel	350 Stel	Tercapai	
8.3				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Medical Check UP	50 Orang	50 Orang	tercapai	
9.				Layanan Administrasi DPRD					
9.1				Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jumlah iuran sehingga estimasi anggaran yang tersedia tidak bisa terserap sepenuhnya.	
9.2				Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai	
9.3				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat	2 Laporan	2 Laporan	Tercapai	

				Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi DPRD				
II.				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
1.				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					
1.1				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	Tercapai	
1.2				Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	Tercapai	
1.3				Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang- undangan	1 dokumen	1 dokumen	Tercapai	
1.4				Fasilitasi	Jumlah dokumen	10 dokumen	10 dokumen	Tercapai	

				Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi				
1.5				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai	
2.				Pembahasan Kebijakan Anggaran					
2.1				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai	
2.2				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai	
2.3				Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai	
2.4				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai	
2.5				Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	Tercapai	

					Per-Semester				
2.6				Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD	3 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai	
3.				Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan					
3.1				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai	
3.2				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai	
3.3				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	2 Laporan	Tercapai	
3.4				Pengawasan	Jumlah laporan hasil	2 Laporan	2 Laporan	Tercapai	

				Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	pengawasan urudan pemerintahan bidang Perekonomian				
3.5				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksan Keuangan	1 Dokumen		LHP BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga tidak ada tindak lanjut dari opini Wajar Tanpa Pengecuallian (WTP).	
4.				Peningkatan Kapasitas DPRD					
4.1				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	Tercapai	
4.2				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentsai Dewan	1 Dokumen	1 dokumen	Tercapai	
4.3				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	7 Orang	7 Orang	Tercapai	

4.4				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	12 Dokumen	12 dokumen	Tercapai	
4.5				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai	
5.				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
5.1				Kunjungan Kerja dalam Daerah	Dokumen hasil kunjungan kerja dalam daerah	12 Laporan	12 Laporan	Sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah pengalokasian jadwal terlalu sedikit, sehingga tidak sesuai dengan estimasi alokasi anggaran yang tersedia.	
5.2				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	<u>Tercapai</u>	
5.3				Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3 Dokumen	3 Dokumen	Tercapai.	

6.				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					
6.1				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	Tercapai	
6.2				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan tidak ada aduan terhadap pelanggaran kode etik Pimpinan dan Anggota DPRD.	
7.				Pembahasan Kerja Sama Daerah					
7.1				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	3 Dokumen	2 dokumen	Tercapai	
8.				Fasilitasi Tugas DPRD					
8.1				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas	12 Dokumen	12 dokumen	Tercapai	

				DPRD					
8.2				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1 Laporan	1 laporan	Tercapai	
8.3				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.	12 Dokumen	12 dokumen	Tercapai	

Brebes, 5 Februari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BREBES

KOMAR, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640714 199203 1 006